

MEMBERDAYAKAN PRESTASI SISWA MELALUI UPAYA PENGELOLAAN MANAJEMEN SEKOLAH

Jumiyanto Widodo
FKIP UNS, Surakarta

Email: Dediw90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pengelolaan Manajemen Sekolah dalam rangka memberdayakan prestasi siswa melalui implementasi, dukungan ataupun hambatannya dalam implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan mengambil setting data ketika program tersebut dijalankan Sekolah yaitu di tahun 2005/2006 oleh SMA N 1 Klaten. Sebagai sebuah penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu yang terjadi dalam konteks yang tepat, sehingga bersesuaian dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data yang dikembangkan melalui teknik purposive sampling dilanjutkan teknik snowball sampling yaitu dari kepala sekolah. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi atau arsip yang dilakukan dengan teknik simak libat cakap (observasi partisipasi), teknik rekam, teknik catat dan wawancara secara mendalam (in-depth-interview). Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data menggunakan teknik pola siklus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memberdayakan prestasi siswa sangat terkait dengan keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah. Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SMA N 1 Klaten dibawah koordinasi kepala sekolah telah menjalankan program tersebut dengan baik. Terindikasikan dari : 1) Proses implementasi yang dijalankan telah sesuai dengan petunjuk implementasi yang tertulis dalam buku acuan BA-PGB-05 dengan output implementasi yang menunjukkan kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya; 2) Meningkatnya kepedulian warga sekolah dan orang tua/wali murid melalui Komite Sekolah dalam mendukung pembiayaan BP3 dan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) termasuk dalam memberikan kontribusi pembangunan sarana prasarana; 3) Tingkat kompetisi siswa dan institusi SMA N 1 Klaten yang tinggi, ditunjukkan dari prestasi akademis siswa (lomba/olimpiade dan lulusan) dan program pengembangan institusi : akselerasi, imercy dan SNBI. Dari hasil kajian diketahui faktor pendukung dan penghambat yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik stakeholders, Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten dan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. Menunjukkan perlu peningkatan kapasitas dalam memberikan kontribusi secara lebih aktif, berpartisipasi tidak sekedar materi tapi juga non materi dalam keterlibatan kegiatan sosial, budaya dan keamanan sehingga implementasi MBS sebagaimana di maksudkan juga dalam manajemen pengelolaan

sekolah melalui implementasi kebijakan pengelolaan manajemen yang lainnya bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi, Manajemen, Mutu Sekolah, SMA N 1 Klaten

1. PENDAHULUAN

Perubahan mendasar yang digulirkan sejak terjadinya reformasi nasional di Indonesia 1998 adalah perubahan manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Perubahan manajemen ini termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah". Semangat mewujudkan penyelenggaraan otonomi pendidikan ini kemudian diamanatkan melalui UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004. Tertera dalam bidang pendidikan dimana Program Pembinaan Pendidikan Menengah, salah satunya adalah ditujukan untuk “Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten / kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah”.

Departemen Pendidikan Nasional menindaklanjuti Proopenas di atas dengan mencetak Seri Buku Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah (MPMBS) sub judul Konsep dan Pelaksanaan di tahun 2000. Buku tersebut di revisi setiap tahunnya hingga tahun 2003. Konsep tersebut mulai tahun 2003 kemudian diperkenalkan sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ditjend. Pendidikan Dasar dan Menengah (2003 : 5) memberikan pengertian MBS : “adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional”.

A. Malik Fajar Muluk selaku Mendiknas RI sewaktu kebijakan MBS ini dijalankan pertamakali menyatakan MBS memang sebagai bagian dari tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan di Indonesia yang digulirkan sejak 1999. MBS diyakini akan mampu mengatasi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia (Ibtisam Abu-Duhou, 2003 : xv). Melalui konsep MBS ini, terdapat tuntutan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan semua sumber pendidikan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakatnya. MBS ini kemudian semakin mendapat perhatian pemerintah dengan disahkannya UU Nomor 25 tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan baru.

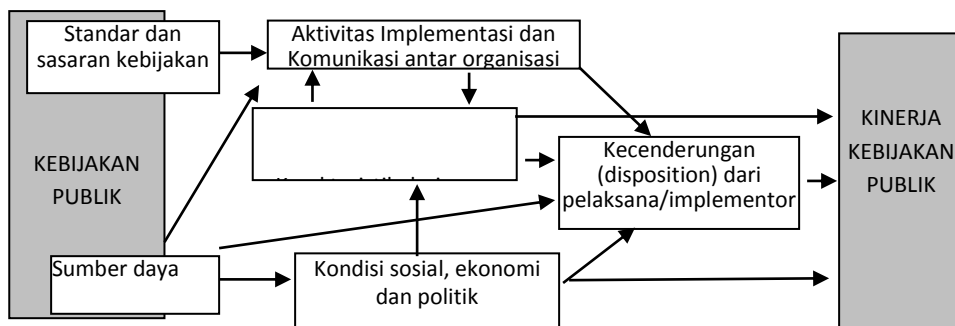
Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi sangat penting karena kegagalan dalam sosialisasi program MBS baik pada tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) sekolah maupun masyarakat, dikhawatirkan akan berdampak pada kesulitan dan gagal melaksanakan konsep

yang sebenarnya bertujuan akhir meningkatkan mutu sekolah, bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat.

Model paling klasik dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik Kebijakan MBS adalah model Van Meter dan Van Horn yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



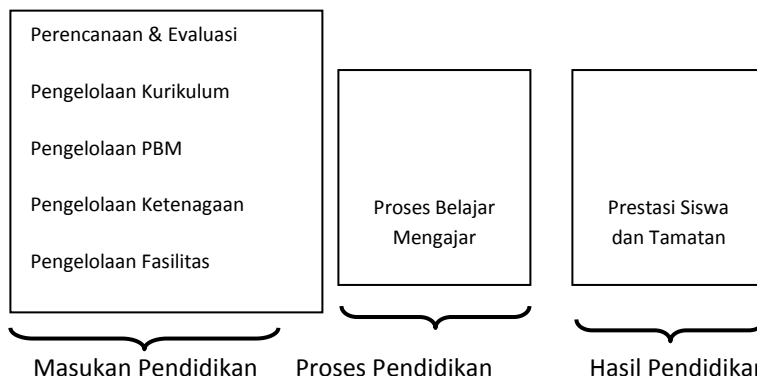
Manajemen Berbasis

(Dwijowijoto, 2003 : 168)

Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas-Ditjend Dasar Menengah, 2003 :5). Beberapa catatan penting tentang keberadaan Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini yaitu : sentralisasi sekolah dan keputusan partisipatif.

Secara visual, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dapat dilihat pada gambar berikut (Depdiknas, 2003 :14).

Gambar 2
Fungsi-Fungsi Pendidikan yang di Desentralisasikan ke Sekolah



Keberhasilan MBS mensyaratkan adanya partisipasi. Untuk menunjang mekanisme pengambilan keputusan partisipatif ini perlu ada lembaga yang memfungsikan dukungan masyarakat melalui perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Keberpihakan konkret tersebut terakomodir melalui upaya terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Program Manajemen Berbasis Sekolah membolehkan adanya keragaman cara melaksanakan (idiografik) dan bukan lagi menggunakan cara yang cenderung seragam untuk semua sekolah (nomografik). Pelaksanaan MBS disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tiap-tiap sekolah. Analisis terhadap keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah melalui implementasi MBS di SMA N 1 Klaten ini berdasar pada Buku Acuan BA-PGB-05 yang disajikan dalam kategori/koridor pencapaian : 1) Sosialisasi MBS, 2) Identifikasi Tantangan Sekolah, Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah, 3) Identifikasi fungsi-fungsi strategis sekolah untuk kepentingan implementasi MBS, 4) Analisis SWOT dan Identifikasi Kesiapan Fungsi KBM, 5) Perumusan Alternatif Pemecahan Masalah

Lokasi penelitian SMA Negeri 1 Klaten memiliki lingkungan sosial yang mendukung pengembangan budaya mutu dalam nuansa akademis. Sebagai sekolah favorit dengan pencapaian prestasi terbaik diajarannya di Kabupaten Klaten yang juga diimbangi oleh potensi masyarakat Klaten untuk dapat terlibat terhadap pengelolaan manajemen SMA N 1 Klaten, terindikasi ketika masyarakat cukup antusias untuk menyekolahkan anaknya di SMA N 1 Klaten. Hal tersebut secara tidak langsung semakin memacu kompetisi akademik sekaligus menjadi potensi tambahan untuk meningkatkan prestasi siswa sekaligus memupuk budaya peningkatan mutu sekolah secara kondusif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengkaji dengan lebih mendalam pada bagaimanakah pelaksanaan program MBS di SMA N 1 Klaten, Kemudian faktor apa saja yang mendukung ataupun menghambat penerapan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA N 1 Klaten tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan pada studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa (Masri Singarimbun, 1989 : 4-5). Penelitian kualitatif menurut Anselm Straus dan Juliet Corbin (2003 : 9) memiliki makna penelitian tersebut menjelaskan secara akurat tentang hal yang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak libat cakap (observasi partisipasi), teknik rekam, teknik catat dan wawancara secara mendalam (*in-depth-interview*). Teknik untuk meyakinkan nilai kebenaran data (Validitas data) adalah teknik triangulasi. H.B. Sutopo (1988:31) membedakan teknik triangulasi menjadi *data triangulation*, *methodological triangulation* dan *teori triangulation*. Penelitian ini menggunakan pembuktian validitas triangulasi data dan metode. Pola pokok teknik analisa data dalam penelitian kualitatif yaitu pola linier dan pola siklus (H.B. Sutopo, 1988 : 18). Penelitian ini menggunakan analisis data Pola Siklus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi konsep MBS diberikan kepada seluruh warga sekolah, orang tua / wali siswa serta masyarakat melalui berbagai kegiatan. Konsep MBS menjadi wacana sudah sejak 1998 diketahui dari wawancara dengan Sutarto, Kasi Kurikulum Kasubdin Dikmenum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten : “Tahun 1998 MBS baru menjadi wacana. Pada saat itu pejabat-pejabat politik termasuk ditingkat kabupaten mengalami transisi dan rotasi, jalan keluar kebijakan ini sempat terputus. Situasi reformasi di tahun 1998 secara sosial politik juga berpengaruh pada dunia pendidikan”.

Depdikbud RI pada tahun 1999 menerbitkan buku berjudul *School Based Management* (Depdiknas-Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU Jakarta) kerjasama dengan Bank Dunia. Menurut Kasubdin Dikmenum P dan K Kab.Klaten, M. Mardoyo, menegaskan bahwa sosialisasi MBS dilakukan oleh segenap unsur yang terkait dunia pendidikan di daerah meliputi: a) Sosialisasi oleh Dinas P dan K Kabupaten Klaten, b) Sosialisasi oleh Keberadaan Buku Teknis MBS dari Depdiknas, c) Sosialisasi oleh Jaringan Internet, d) Sosialisasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten, e) Sosialisasi oleh Komite Sekolah SMA N 1 Klaten, f) Sosialisasi oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Klaten.

Sekolah melakukan identifikasi tantangan lembaga yang meliputi empat hal, yaitu : 1) Kualitas ; menyangkut prestasi yang dihasilkan siswanya, meliputi akademik (NEM dan LKIR) dan non akademik (Seni dan Olahraga), 2) Produktivitas ; menyangkut prosentase kelulusan siswanya tiap tahunnya, 3) Efektivitas ; menyangkut perbandingan capaian NEM dengan nilai NEM ideal dan, 4) Efisiensi ; menyangkut penerimaan PTN dan keberadaan alumni.

SMA N 1 Klaten memiliki visi : “Unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti”. Untuk mewujudkan visi unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, SMA N 1 Klaten menetapkan suatu bentuk layanan yang dituangkan dalam bentuk Misi Sekolah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan

secara efektif sesuai karakteristik keilmuan tiap mata pelajaran yang berorientasi ketuntasan pencapaian hasil pembelajaran melalui pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor secara simultan; 2) Mendorong dan membantu siswa dalam memahami dan mengenali potensinya agar dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan secara optimal; 3) Menumbuhkan semangat keunggulan, kebersamaan dalam keragaman, kepekaan sosial dan mengembangkan budaya mutu secara intensif kepada segenap warga sekolah; 4) Mendorong dalam membantu terbentuknya manusia berbudi luhur dan berkepribadian kuat yang didasari oleh penghayatan terhadap agama secara benar. 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan pihak sekolah (*stakeholder*) sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukannya. ; 6) Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan pemanfaatan literasi berbahasa Inggris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berstandar internasional; 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komputer serta sarana laboratorium MIPA yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran berbasis internet berstandar internasional; 8) Meningkatkan kualitas layanan terhadap publik pengguna informasi pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kemampuan manajemen informatika berbasis internet berstandar internasional.

SMA N 1 Klaten berhasil mendapat kepercayaan Depdiknas Pusat sebagai Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI) dan dari Dinas P dan K Propinsi SMA N 1 Klaten dipercaya menyelenggarakan kelas akselerasi dan *imercy*. Rintisan keduanya dibuka di Tahun Pelajaran 2006/2007. Misi SMA N 1 Klaten point 6, 7 dan 8 menggambarkan orientasi *go international*. Sosialisasi Visi-misi SMA N 1 Klaten ini dilakukan dengan menempelkan papan besar visi-misi pada dinding koridor pintu gedung utama masuk sekolah.

Tujuan keberadaan SMA N 1 Klaten adalah: 1) Menghasilkan kelulusan yang berbudi luhur, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.; 2) Membekali ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam memperoleh nilai ulangan umum, nilai ujian daripada siswa-siswi sekolah lain, sehingga mampu berkompetisi masuk perguruan tinggi yang favorit. (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah SMA N 1 Klaten Tahun 2005/2006 : h.9)

Tujuan sekolah diidentifikasi secara makro, belum melakukan dalam jangka waktu menengah dan spesifik sebagaimana dicontohkan dalam tahapan MBS di BA-PGB-05. Dalam konfirmasi yang dilakukan pada Bapak Lasa, disampaikan bahwa SMA N 1 Klaten membuat identifikasi tujuan sekolah yang spesifik adalah pada pengembangan sekolah SNBI. Identifikasi tersebut bahkan dibuat secara detil hingga 2011.

Sasaran SMA N 1 Klaten TP. 2005/2006 terfokus pada prestasi akademis siswa, sebagai berikut : 1) Meningkatkan rata-rata Nilai Ujian Nasional dari tahun ke tahun; 2) Meningkatkan jumlah lulusan SMA N 1 Klaten yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terkemuka; 3) Sekurang-kurangnya 2 mapel menjadi duta Jawa Tengah dalam lomba/olimpiade mapel; 4) 20% guru per tahun mampu berbahasa Inggris secara aktif; 5) 20% guru mampu menggunakan ICT

dalam pembelajaran. (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah SMA N 1 Klaten Tahun 2005/2006 : h.13-17)

Identifikasi fungsi strategis lembaga, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 1 Klaten Nomor : 890/373/01 tentang pengelolaan SMA N 1 Klaten TP 2005/2006. Fungsi-fungsi di SMA N 1 Klaten bersifat adaptif mempertimbangkan pengembangan institusional SMA N 1 Klaten. Fungsi-fungsi baru sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan institusional dari SMA N 1 Klaten sendiri.

Saat itu struktur organisasi yang digunakan mengacu pada peraturan Gubernur Jateng No. 3 Tahun 2005. Posisi kepala sekolah di struktur berada satu kotak dengan empat wakilnya sebagai satu kesatuan, berlaku sejak kurikulum 1994 dijalankan. Sebelumnya kepala sekolah berada di top hirarkhi kemudian berjenjang dibawahnya 4 (empat) wakil kepala. Pada tiap awal tahun pelajaran diadakan rapat dinas yang khusus membahas pembagian tugas struktural, tenaga administrasi dan karyawan pendukung. Dengan demikian peran partisipatif dalam pembuatan keputusan dan manajerial sekolah terfasilitasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan dalam struktur adaptif tersebut.

Kegiatan workshop guru sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah waktu itu, Drs. Lasa, bahwa workshop mata pelajaran sering bersifat internal dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) selain juga dilakukan oleh internal sekolah dalam kegiatan rutin dan insidental antara lain :

- (1) Perubahan tugas mengajar ;
- (2) Perubahan syllabi atau materi kurikulum dikarenakan ada perubahan kebijakan baru atau perkembangan jaman, perubahan itu sering terjadi untuk mata pelajaran ilmu sosial.

Kegiatan workshop dipahami sebagai usaha melakukan analisa kependidikan yang aplikatif untuk dipraktekkan meskipun bersifat sektoral, misalkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Koordinasi rutin bulanan dan rapat dinas tahunan serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Ketika program MBS diperkenalkan pada kelanjutannya muncul banyak program pengembangan prestasi siswa didukung secara kelembagaan, seperti kelas *imercy*, akselerasi dan SNBI. Hal tersebut menuntut dilakukannya workshop dengan segenap komponen dalam rangka mengidentifikasi SWOT dan tingkat kesiapan sekolah. Berikut ini hasil analisa SWOT yang dilakukan SMA N 1 Klaten (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Tahun 2005/2006 : h. 10).

Kekuatan SMA N 1 Klaten (S = strength) antara lain : 1) Input siswa rata-rata baik; 2) Guru-guru lebih dari 98% berijazah S1; 3) Letak sekolah strategis dan lingkungan yang mendukung. Kelemahannya adalah : 1) Jumlah kelas yang banyak (28 kelas); 2) Kesadaran belajar sebagian siswa masih kurang; 3) Semangat kompetisi guru, karyawan dan siswa masih kurang; 4) Penguasaan bahasa inggris untuk guru masih kurang; 5) Sebagian sarana dan prasarana kurang memadai.

Peluang sekolah (O = opportunity) antara lain : 1) Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan SDM masih memungkinkan; 2) Peningkatan mutu output, baik akademis, non akademis maupun *life skill* masih sangat memungkinkan dengan mengacu pada kekuatan sekolah. Kemudian ancamannya

(T=Threat) adalah : 1) Belum maksimalnya pengembangan KBM; 2) Masih lemahnya tanggung jawab-kedisiplinan sebagian guru, karyawan dan siswa. 3) Etos kerja dari masing-masing personal masih kurang, sehingga dapat memerosotkan mutu lulusan; 4) Kekompakan di antara sebagian guru dan karyawan masih kurang.

Program pengembangan institusional SMA N 1 Klaten dilakukan secara proaktif, mengidentifikasi fungsi PBM, kurikulum, personalia, evaluasi, keuangan dan fasilitas yang diperlukan dalam setiap program merujuk pada kesimpulan "siap". Kondisi siap yang dimaksud adalah kesiapan diri menghadapi perubahan kebijakan, termasuk mengidentifikasi kelemahan/ kekurangan yang secara solutif akan segera dapat dikondisikan menjadi siap.

Berikut ini adalah rencana kerja SMA N 1 Klaten di Tahun Pelajaran 2005/2006 (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Tahun 2005/2006 : h. 14-17): a) Program peningkatan perolehan nilai UAN; b) Program peningkatan jumlah siswa yang meneruskan ke perguruan tinggi; c) Program peningkatan perolehan kejuaraan olimpiade mata pelajaran; d) Program peningkatan kemampuan guru berbahasa inggris; e) Program kegiatan peningkatan penguasaan ICT (Information Computer and Technology).

Setiap program ditetapkan penanggungjawabnya dan dirumuskan tahap-tahap pelaksanaannya. Untuk alternatif pemecahan masalah terkait analisis kelemahan dan ancaman sekaligus pelaksanaan program di SMA N 1 Klaten ditetapkan antara lain: 1) Melengkapi sarana pembelajaran sehingga KBM dapat berjalan maksimal; 2) Meningkatkan kesadaran belajar siswa dengan menyediakan buku-buku yang memadai dan sarana laboratorium yang memadai; 3) Meningkatkan etos kerja dengan adanya sarana yang memadai; 4) Meningkatkan kemampuan guru berbahasa inggris; 5) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dari segenap warga sekolah (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Th 2005/2006: h. 12).

SMA N 1 Klaten menetapkan tantangan utama pengembangan MBS adalah peningkatan prestasi akademik siswanya. Untuk itu dilakukan upaya-upaya terobosan pemberdayaan dan pengembangan institusional. Oleh Dinas P dan K propinsi SMA N 1 Klaten telah dipercaya kembali menyelenggarakan kelas akselerasi 2 kelas angkatan ke-2 setelah sebelumnya dinyatakan berhasil lolos PTN 100% di lulusan angkatan pertama. Sebagai pengakuan keberhasilan tersebut, maka SMA N 1 Klaten di percaya lagi untuk rencana pengembangan kelas *imercy* di tahun 2007, dimana tujuh mata pelajaran pokok akan disampaikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

Bulan April 2005 SMA N 1 Klaten mengajukan proposal *School Development and Investment Plan (SDIP)* untuk pengajuan rintisan pengembangan Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI). Keberadaan SNBI sendiri memacu peningkatan diberbagai aspek dan fungsi-fungsi di SMA N 1 Klaten melalui *progress* riil antara lain: 1) Meningkatkan tingkat pendidikan kepala sekolah setingkat S2, Kepala TU setingkat S1, dan tenaga pendukung lain setingkat D3; 2) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dan pengembangan profesi; 3) Melakukan pelatihan bahasa inggris untuk semua

tenaga kependidikan; 4) Mengadakan pelatihan ICT (*information-computer and technology*) untuk tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*School Development and Investment Plan (SDIP)*; 2006 hal.9)

Point-point di atas akan direalisasikan secara bertahap dan untuk itu telah dibuat perencanaan program dan pembiayaannya yang disusun secara detil selama 15 tahun kedepan (hingga tahun 2011). Dalam wawancara dengan Wakasek Kurikulum, Joko Tristiyanto didapatkan data bulan juni 2006 proposal SDIP diajukan kembali untuk pencairan bantuan senilai 300 juta yang akan dialokasikan untuk sektor: 1) Peningkatan kemampuan Guru dalam berbahasa inggris; 2) Peningkatan kemampuan Guru dalam Teknologi Informatika dan; 3) Penambahan sarana prasarana penunjang tercapainya peningkatan kemampuan guru berbahasa inggris dan teknologi informatika.

Untuk keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK), disampaikan oleh Drs. M. Agus Salim (Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten) bahwa pada Tahun Pelajaran 2005/2006 ini Dewan Pendidikan masih terkonsentrasi pada terbentuknya komite sekolah UPT dari SD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat di keseluruhan wilayah Klaten. Mengkonsolidasi agar masing-masing komite sesuai dengan kedudukannya, dan juga mendorong pembuatan AD/ART nya masing-masing. DPKK berkoordinasi mengupayakan komite sekolah dapat berjalan efektif dengan datang langsung ke lokasi sekolah, memberikan dorongan masing-masing komite sekolah. CB Suwanto (Staf sekretariat DPKK) menyampaikan bahwa kurang optimalnya peran kelembagaan DPKK disinyalir salah satunya adalah karena secara pribadi anggota DPKK juga seorang pegawai negeri aktif atau pengusaha yang sibuk yang konsekwensinya ada konsentrasi yang terbagi, atau keengganan mengkritisi. Lebih-lebih, ada realitas bahwa anggota Dewan Pendidikan tidak mendapat gaji tetap melainkan honor dan insentif dalam operasional kerja yang relatif kecil.

Untuk keterlibatan Komite Sekolah, Keanggotaan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten sebagaimana DPKK, tidak memiliki keterikatan formal kedinasan tapi lebih bersifat dedikasi berdasar komitmen personal (moral). Kepengurusan komite sekolah SMA N 1 Klaten terbagi dalam 3 bidang yaitu : Akademik dan Kesiswaan, Tenaga Kependidikan dan Kehumasan serta Keuangan dan Sarana Prasarana. Bambang Val, anggota komite sekolah menyatakan bahwa partisipasi komite sekolah SMA N 1 Klaten ini lebih banyak pada bidang keuangan dan sarana prasarana, untuk akademik - kesiswaan dan tenaga kependidikan – kehumasan masih dalam batas minimal.

Berdasarkan analisa data maka dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi MBS di SMA N 1 Klaten. Dalam hal ini tentu saja di tinjau dari instrumen utama program MBS yaitu kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik. Untuk faktor pendukung dari lembaga pelaksana SMA N 1 Klaten antara lain : 1) Potensi dasar SDM; 2) Profil SMA N 1 Klaten sebagai sekolah yang terdepan di jajarannya; 3) Inisiatif KS dan guru mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan; 4) Program pengembangan institusional : kelas Akselerasi, *Imercy* dan *SNBI*. 5) Sarana prasarana; 6) Dukungan pembiayaan (APBN, APBD I, APBD II, Dinas P dan K Propinsi, hibah luar negeri serta komite sekolah); 7)

Lingkungan belajar yang kondusif; 8) Sistem pembelajaran interaktif berbasis KBK (kurikulum berbasis kompetensi); 9) Fasilitas Olah Raga dan Kesenian yang cukup lengkap.

Untuk pendukung dari sisi stakeholders meliputi : 1) Dukungan orang tua/wali siswa; 2) Struktur ekonomi masyarakat; 3) Akses komunikasi, transportasi dan informasi; 4) Banyak lembaga pendidikan tinggi; 5) Eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK) dan Komite SMA N 1 Klaten. Pendukung dari sisi DPKK meliputi : 1) Potensi SDM DPKK; 2) Kemandirian/tidak me-miliki ikatan hierarkhis dengan dinas-dinas pemerintah, pembagian bidang kerja secara lengkap; 3) Potensi masyarakat dan dunia usaha/dunia industri Klaten; 4) Dinamika tinggi dunia pendidikan di Klaten. Pendukung dari sisi Komite Sekolah antara lain : 1) Sikap Kooperatif dan akomodatif ketua komite pada sekolah; 2) Penerimaan orang tua siswa pada eksistensi yang berbeda dari penilaian BP3; 3) Dukungan orang tua /wali siswa

Adapun penghambatnya dari sisi SMA N 1 Klaten: 1) Belum ada kriteria standar kepegawaian; 2) Mayoritas tenaga administratif masih berijazah SMA; 3) Dominasi prasyarat seleksi PSB oleh Dinas P dan K; 4) Belum ada kriteria standar sarana prasarana; 5) Inventarisasi Perpustakaan lemah belum komputerisasi; 6) Belum tercapai rasio buku teks dan buku referensi untuk guru dan siswa. Untuk penghambat dari masyarakat diidentifikasi beberapa hal antara lain : 1) Masyarakat belum terlibat secara aktif, khususnya dunia usaha dan industrinya; 2) Program MBS yang kurang dipahami; 3) Hambatan dari siswa (ekonomi, sosial dan akademis); 4) DPKK dan Komite Sekolah yang masih berfungsi normatif.

Selanjutnya hambatan dari sisi DPKK antara lain : 1) Koordinasi yang terkendala masalah adat *ewuh-pakewuh*, terlebih kerja DPKK tidak terkompensasi gaji; 2) Benteng birokrasi dinas pendidikan dan pemerintahan umum; 3) Keterbatasan dana tergantung alokasi pemerintah daerah; 4) profesionalisme kerja di tiap bidang yang lemah karena pertanggungjawaban juga lemah; 5) Sulit menjalankan mekanisme *reward* terlebih *punishment*; 6) Administrasi dan arsip yang lemah; 7) Kreativitas dan daya proaktif mengawal program MBS masih relatif lemah. Adapun hambatan dari sisi Komite Sekolah antara lain : 1) Kreativitas dan daya proaktif mengawal program MBS masih relatif lemah; 2) Belum memberdayakan potensi komite di luar urusan finansial; 3) Koordinasi antara sektor dunia usaha dan industri, DPKK, dan Dinas P dan K masih terbatas.

4. KESIMPULAN

Bahwa dalam memberdayakan prestasi siswa sangat terkait dengan keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah. Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai upaya pengelolaan manajemen sekolah yang akan tetap relevan dalam perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan berikutnya, pada SMA N 1 Klaten dibawah koordinasi kepala sekolah telah menjalankan program tersebut dengan baik. Diindikasikan dari : 1) Proses implementasi yang dijalankan telah sesuai dengan petunjuk implementasi yang tertulis dalam buku acuan BA-PGB-05 dengan output implementasi yang menunjukkan kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan

mengoptimalkan sumberdaya; 2) Meningkatnya kepedulian warga sekolah dan orang tua/wali murid melalui Komite Sekolah dalam mendukung pembiayaan BP3 dan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) termasuk dalam memberikan kontribusi pembangunan sarana prasarana; 3) Tingkat kompetisi siswa dan institusi SMA N 1 Klaten yang tinggi, ditunjukkan dari prestasi akademis siswa (lomba/olimpiade dan lulusan) dan program pengembangan institusi : akselerasi, *imercy* dan SNBI. Dari hasil kajian diketahui faktor pendukung dan penghambat yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik *stakeholders*, Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten dan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. Menunjukkan perlu peningkatan kapasitas dalam memberikan kontribusi secara lebih aktif, berpartisipasi tidak sekedar materi tapi juga non materi dalam keterlibatan kegiatan sosial, budaya dan keamanan sehingga implementasi MBS sebagaimana di maksudkan juga dalam manajemen pengelolaan sekolah melalui implementasi kebijakan pengelolaan manajemen yang lainnya bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks:

- Abu, Ibtisam – Duhou. 2002. *School-Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah). PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta
- Dwijowijoto, Riant N. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sutopo, HB. 1988. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar, Teori dan Praktis*. Pusat Penelitian UNS. Surakarta.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei-edisi revisi*. LP3ES. Jakarta.
- Strauss Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Buku panduan MBS, peraturan-peraturan dan dokumen:

- Departemen Pendidikan Nasional-Ditjend Dikdasmen-Direktorat Tenaga Kependidikan. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah BA-PGB-05*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional-Ditjend. Pendidikan Dasar dan Menengah. 2004. *Panduan Umum – Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta.
- Muluk, A. Malik Fajar. 2004. *Renungan Hardiknas 2004 (artikel)*. Harian Umum Kompas, tanggal 3 Mei 2004
- Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.
- Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*.
- Proposal SMA N 1 Klaten. April 2005. *Proposal School Development and Investment Plan (SDIP) – pertama. SMA N 1 Klaten*.
- _____. 11 Februari 2006. *Proposal School Development and Investment Plan (SDIP) – Kedua . SMA N 1 Klaten*

SNPAP “Pengembangan Ilmu dan Profesi
Administrasi Perkantoran: Tantangan dan Peluang”

Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten. 2005. *Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005*

Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. 23 Februari 2005. *Laporan Pertanggungjawaban Komite Sekolah ; Reorganisasi Pengurus Komite.*